

ARTI PENTING ASEAN OUTLOOK ON INDO PACIFIC BAGI VISI INDONESIA MENJADI POROS MARITIM DUNIA

Artha Yudilla

Program Studi Hubungan Internasional Universitas Islam Riau

Email: arthayudilla@soc.uir.ac.id

Abstract

The geostrategic and geopolitical position provides opportunities for Indonesia not only as a global economic route but also an international maritime security route. Maritime wealth is also a strength in Indonesia's maritime diplomacy in the international realm. This is then the basis for formulating mega-project policies to make Indonesia a global maritime axis. Since being declared in 2014, Indonesia has carried out a series of regional collaborations with the aim of achieving its vision as a Global Maritime axis. Among them are the Belt and Road Initiative with China to the IORA with countries in the Indian Ocean region. However, Indonesia's position as a Southeast Asian country with ASEAN as the first regional organization remains atop priority. It is proven that in 2019, Indonesia became the country that initiated the ASEAN Outlook on Indo Pacific with the aim of expanding the scope of cooperation among ASEAN countries. This also means that it will provide space for Indonesia to increase its power in the Indo Pacific region. This is certainly in line with Indonesia's vision to become the world's maritime axis. So this study will try to analyze the significance of the ASEAN Outlook on Indo Pacific (AOIP) for the vision of the World Maritime Axis.

Keywords: *Global Maritime Fulcrum, AOUP, Geopolitics, Developmental Regionalism*

PENDAHULUAN

Indo-Pasifik merupakan konsep geografis yang membentangi wilayah Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Kawasan ini menjadi kawasan yang paling dinamis dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dibandingkan belahan dunia lainnya (Montratama, 2016: 36). Selain itu, pertumbuhan dan mobilitas laut yang berkembang pesat menjadikan kawasan ini memiliki rute laut yang paling penting di dunia, sehingga Indo-Pasifik dikatakan sebagai pusat perekonomian dan politik dunia. Kawasan Indo-Pasifik ini mencakup Australia, menelusuri pantai timur Afrika, sebagian besar kawasan Asia Timur, Asia Tenggara, Selandia Baru, dan berakhir di Hawaii. Oleh karena itu kebijakan serta kerja

sama yang muncul di kawasan ini, turut mempengaruhi Asia Tenggara sebagai kawasan yang termasuk di dalam Indo-Pasifik.

Dikatakan sebagai kawasan tersibuk, Indo-Pasifik memiliki peranan tersendiri di mata setiap negara. Hal ini dikarenakan, kawasan Indo-Pasifik memperoleh perhatian khusus dari negara-negara besar, seperti Tiongkok, Amerika Serikat (AS), India, dan Australia yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi dalam kawasan tersebut tergolong pesat. Kebijakan serta kerja sama yang muncul di kawasan ini, turut mempengaruhi Asia Tenggara sebagai kawasan yang termasuk di dalam Indo-Pasifik. Pengaruh ini terasa di Asia Tenggara dikarenakan beberapa jalur

perdagangan internasional juga melewati kawasan Asia Tenggara, lebih tepatnya melewati selat yang ada di Indonesia.

Terdapat 40% dari total 90% jalur perdagangan melewati perairan Indonesia (Dephub, 2/3/2018). Keuntungan ini bisa memberikan peluang besar untuk memfasilitasi Indonesia menjadi pusat industri perdagangan serta pelayaran maritim dunia (ITB, 1/11/2014). Indonesia juga memiliki kedaulatan terhadap wilayah laut yang memberikan Indonesia sebuah kuasa untuk mengelola segala sumber daya alam yang berada di dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan Landas Kontinen, serta memberikan keuntungan bagi Indonesia tidak hanya dari aspek ekonomi, namun juga politik. Kedaulatan yang dimiliki Indonesia juga dapat membantu untuk mempertahankan jalur perdagangan ini sebagai laut wilayah, sehingga Indonesia memiliki potensi lebih besar untuk turut mengatur jalur perdagangan yang ada.

Keuntungan ini memberikan Indonesia ruang untuk lebih banyak mengikuti kerja sama yang ada di kawasan seperti: Indian Ocean Rim Association (IORA); Regional Maritime Security Initiative (RMSI); ASEAN Maritime Forum (AMF); Malacca Straits Council (MSC); Our Ocean Conference (OOC). Kerja sama di kawasan Indo-Pasifik dilakukan oleh sebagian besar negara yang berada di sekitar kawasan, tak terkecuali Indonesia.

Pemerintah Indonesia mengeluarkan gagasan ASEAN Outlook on Indo-Pacific (AOIP), yang dilihat berdasarkan potensi di kawasan regionalnya. Konsep AOIP ini pertama kali digagas oleh mantan Menteri Luar Negeri Indonesia Marty Natalegawa pada tahun 2013, yang kemudian dikembangkan kembali tahun 2017. Gagasan mengenai AOIP secara umum disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada Konferensi

Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN-India tahun 2018 (CNN Indonesia, 26/01/2018). Konsep AOIP yang digagas oleh Pemerintah Indonesia pada dasarnya merupakan tanggapan terhadap tantangan yang berkembang dan berasal dari kawasan eksternal ASEAN. Dalam pemaparan konsep yang diajukan Indonesia, ASEAN dijelaskan sebagai organisasi sentral yang selama ini berada di kawasan Asia Pasifik dan Samudra Hindia.

Sebagai organisasi sentral, ASEAN selama ini telah berperan dalam menjaga stabilitas dan dinamika yang ada di kawasan Asia Tenggara. Dalam perkembangannya, wilayah Asia Pasifik dan Samudra Hindia mengalami perubahan secara geopolitik maupun geostrategis. Hal ini dikarenakan wilayah tersebut merupakan pusat pertumbuhan ekonomi. Perkembangan ini juga memicu adanya keuntungan dan tentunya tantangan bagi kawasan. Pemerintah Indonesia juga menjelaskan tentang bagaimana tatanan dunia yang mulai berubah ini dapat mengancam keutuhan dan kesatuan ASEAN, sehingga perlu adanya platform untuk kawasan regional Asia Tenggara agar konflik perihal kedaulatan di luar kawasan dapat dikurangi (Roza, 2019:10).

Selain untuk kepentingan ASEAN, outlook baru ini juga sejalan dengan visi Poros Maritim Dunia (*Global Maritime Fulcrum*) milik Indonesia yang dideklarasikan oleh Presiden Joko Widodo di tahun 2014 dan bertujuan visi untuk mengoptimalkan *tangible power* sektor maritim yang sangat potensial dan menjadikan Indonesia sebagai negara *middle power* yang semakin kuat secara ekonomi politik dan pertahanan di wilayah Asia Pasifik dengan lima pilar kebijakan yakni:

1. Membangun kembali budaya Maritim Indonesia. Indonesia sebagai negara

kepulauan terbesar dengan 18.000 pulau, harus menyadari bahwa lautan sebagai bagian dari identitas nasional dan kemakmuran yang berarti oleh manajemen laut yang baik menentukan masa depan Indonesia.

2. Memelihara dan mengelola sumber daya kelautan, dengan pengembangan industri perikanan yang berkesinambungan melalui kedaulatan di sektor pangan laut.
3. Memprioritaskan konektivitas maritim dan pengembangan infrastruktur. Program termasuk mengembangkan jaringan logistik dan pelabuhan laut dalam, mendirikan industri pariwisata Maritim, membangun jalan tol di sepanjang pantai Jawa dan industri pelayaran.
4. Mengintensifkan diplomasi Maritim. Hal ini dengan mengundang negara mitra untuk bekerja sama dalam masalah Kelautan guna mengurangi dan menengahkan sengketa serta faktor konflik seperti sengketa teritorial, penangkapan ikan ilegal, penyelundupan, pembajakan, pelanggaran kedaulatan dan polusi.
5. Penguatan kemampuan pertahanan Maritim Indonesia. Tujuannya bukan hanya untuk mempertahankan kedaulatan Maritim Indonesia dan sumber daya alamnya, tetapi juga menjamin keamanan dan keselamatan kawasan keamanan laut.

Kebijakan ini juga merupakan mega proyek yang membutuhkan dana hingaratusan triliun rupiah untuk pembangunan 24 pelabuhan (total biaya sekitar 39.5 triliun rupiah), dan pembelian 609 kapal (total biaya sekitar 57.31 triliun rupiah). Berikut peta cetak biru kebijakan Poros Maritim Dunia Indonesia. Maka penelitian ini akan mencoba menganalisis seberapa penting ASEAN

Outlook on Indo Pacific (AOIP) ini terhadap pencapaian visi Poros Maritim Dunia.

METODE PENELITIAN

Pengumpulan data bersifat purposive, bermaksud untuk menguatkan argumen. penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan atau metode kualitatif karena argumen yang dibangun berdasarkan pada basis rasional. Untuk memperoleh data digunakan teknik pengumpulan data secara sekunder yaitu studi pustaka, atau dengan menelusuri, mengumpulkan, dan membahasa data-data yang berasal dari berbagai literatur seperti review atas buku, artikel, jurnal, data online, surat kabar, dan majalah. Adapun data primer diambil dari website sejumlah pihak pemaku kebijakan seperti Kementerian Luar Negeri, Global Maritime Fulcrum Task Force, serta blueprint ASEAN Outlook on Indo Pacific. Adapun konsep yang digunakan sebagai pisau analisis diantaranya:

1. Geopolitik

Konsep geopolitik merupakan konsep hubungan internasional yang menyatakan bahwa satu kawasan / geografi memegang peran yang cukup signifikan untuk menentukan arah kebijakan luar negeri satu negara. Unsur-unsur seperti lokasi, luas wilayah, iklim, topografi, demografi, sumber daya alam, dan pemanfaatan *science* / teknologi menjadi sangat penting. Geopolitik melihat *power* satu negara dari dua sudut pandang yakni *land power* dan *sea power*.

Negara yang memiliki kawasan / geografis yang strategis dan potensial akan membuat kebijakan luar negeri negara yang bersangkutan menjadi cenderung berupaya untuk mengeksplorasi lebih dan memaksimalkan kawasan itu, dan negara tetangga juga akan berusaha untuk mendapatkan keuntungan dari wilayah tersebut, baik berupa kerjasama dengan negara pemilik kawasan maupun dengan

cara- cara *coersive*. Seharusnya negara pemilik *land power* atau *sea power* mampu memanfaatkan power yang dimilikinya dan memiliki posisi tawar yang bagus dalam kerjasama terkait kawasan dengan negara lain. Hal ini menjelaskan bagaimana Indonesia memiliki kepentingan secara geopolitik berupa kebijakan Poros Maritim Dunia yang bertujuan mengoptimalkan kawasan maritim untuk peningkatan *power* baik ekonomi, politik, maupun militer.

Indo-Pasifik merupakan konsep geografis yang membentangi wilayah Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Kawasan ini menjadi kawasan yang paling dinamis dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dibandingkan belahan dunia lainnya (Montratama, 2016: 36). Selain itu, pertumbuhan dan mobilitas laut yang berkembang pesat menjadikan kawasan ini memiliki rute laut yang paling penting di dunia, sehingga Indo-Pasifik dikatakan sebagai pusat perekonomian dan politik dunia. Kawasan Indo-Pasifik ini mencakup Australia, menelusuri pantai timur Afrika, Sebagian besar kawasan Asia Timur, Asia Tenggara, Selandia Baru, dan berakhir di Hawaii. Oleh karena itu kebijakan serta kerja sama yang muncul di kawasan ini, turut mempengaruhi Asia Tenggara sebagai kawasan yang termasuk di dalam Indo-Pasifik. ASEAN Outlook on Indo Pacific memberikan ruang untuk negara-negara ASEAN untuk bisa meningkatkan intensitas dan cakupan kerjasama di kawasan strategis indo pasifik yang mana hal ini juga sejalan dengan visi poros maritim dunia milik Indonesia.

2. *Developmental Regionalism*

Kerjasama kawasan mulai dibentuk pasca Perang Dunia II. Ketika Perang Dunia II berakhir, Negara-negara sepakat untuk membentuk sebuah komunitas baru. Komunitas baru ini dimaksudkan untuk

membentuk tatanan dunia baru (New World Order) guna mencegah agar perang dunia tidak kembali terulang. Pembentukan kelompok-kelompok baru tersebut disinyalir sebagai dasar dari apa yang disebut dengan Regionalisme pada saat ini.

Memang masih menjadi perdebatan ketika membicarakan definisi mengenai regionalisme. Tapi jika merujuk contoh regionalisme seperti halnya Uni Eropa maupun ASEAN, secara mudah bisa dikatakan bahwa regionalisme merupakan sebuah kerjasama kawasan. Adapun proses terbentuknya sebuah kawasan pasti memiliki karakteristik tertentu tidak terkecuali regionalisme.

Karakteristik regionalism bisa merujuk pada apa yang ditulis oleh Stubbs dan Underhill di mana mereka mengidentifikasi tiga elemen penting regionalism. Elemen penting ini bisa dijadikan dasar ketika berbicara mengenai regionalism sekaligus merupakan karakteristik terbentuknya regionalisme. Adapun elemen tersebut antara lain pertama, adanya pengalaman historis yang sama dan perasaan akan persoalan-persoalan Bersama di antara kelompok- kelompok negara atau masyarakat dalam suatu batas geografi. Karakteristik ini merupakan hal dasar dan bahkan umum ketika berbicara mengenai Kerjasama Kawasan. Dan ini muncul bersamaan dengan berakhirnya perang dunia kedua dimana negara-negara tersebut merasa memiliki perasaan senasib baik yang sebagai pemenang perang maupun negara lainnya. Dengan adanya regionalisasi mereka mengharapkan adanya sebuah bentuk kerjasama baru dimana diantara anggotanya terdapat ketergantungan satu dengan lainnya dan dikarenakan adanya ketergantungan tersebut maka dapat meminimalkan konflik yang ada karena antara satu anggota dengan lainnya

memiliki perasaan membutuhkan satu dengan lainnya.

Kedua, adanya interaksi yang lebih *intense* di antara anggota-anggota dibandingkan dengan interaksinya dengan dunia luar. Mengacu kepada karakteristik yang pertama, karakteristik kedua ini lebih meningkatkan tingkat interaksi antar anggotanya. Jika pada karakteristik pertama anggota merasakan perasaan yang sama maka di karakteristik yang kedua ini anggota meningkatkan intensitasnya dengan tujuan lebih mempererat perasaan terkait persoalan bersama yang mereka hadapi.

Ketiga, munculnya organisasi yang memberikan kawasan tersebut kerangka institusi dan hukum dan menyediakan “*rules the game*”. Karakteristik ini terbentuk dikarenakan lebih adanya keinginan memperkuat kekuatan di kawasan tersebut. Dimana untuk memperkuatnya terdapat tujuan-tujuan tertentu. Seperti ASEAN ataupun UE. Kedua contoh kerjasama kawasan tersebut lebih kepada tujuan yang bersifat *low politics* seperti sosial, ekonomi, ataupun budaya.

Dengan perkembangan regionalisme kita mengacu pada upaya dari pelaku negara, pasar dan masyarakat sipil) dalam wilayah geografis untuk meningkatkan pembangunan ekonomi daerah secara keseluruhan dan meningkatkan posisinya dalam perekonomian dunia. Regionalisme pembangunan adalah fenomena yang relatif baru. Ini berisi argumen tradisional untuk kerjasama regional dari berbagai relevansi untuk aktor yang berbeda, seperti ukuran teritorial, ukuran populasi, dan skala ekonomi, namun, lebih secara signifikan, juga menambahkan beberapa yang mengungkap keprihatinan dan ketidakpastian baru dalam transformasi saat ini dari tatanan dunia dan ekonomi dunia, seperti manajemen sumber daya, dividen

perdamaian, jaminan sosial, investasi dan keuangan, stabilitas dan kredibilitas.

Regionalisme pembangunan meliputi kerjasama antar negara di daerah yang lebih luas dari sekedar perdagangan dan fasilitasi perdagangan, untuk mencakup-misalnya-investasi, penelitian dan pengembangan, serta kebijakan yang bertujuan untuk mempercepat industri Regional pembangunan dan penyediaan infrastruktur Regional, seperti pembangunan jaringan jalan dan jalur kereta api yang lebih baik. Konsep regionalisme pembangunan juga menawarkan jalan tengah dimana negara-negara anggota seharusnya tidak kehilangan kedaulatannya meskipun harus berperan aktif dalam kerjasama regional. Hal ini jugalah yang coba ditawarkan oleh *ASEAN Outlook on Indo Pacific*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

ASEAN Outlook Indo Pasific: An Overview

Kawasan Asia-Pasifik dan Samudra Hindia termasuk yang paling dinamis di dunia serta pusat pertumbuhan ekonomi selama beberapa dekade. Akibatnya, wilayah-wilayah tersebut terus mengalami pergeseran geopolitik dan geostrategis. Pergeseran ini menghadirkan peluang sekaligus tantangan. Di satu sisi, pertumbuhan ekonomi Kawasan membuka kemungkinan kerjasama untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup jutaan orang. Di sisi lain, munculnya kekuatan material, yaitu ekonomi dan militer, membutuhkan menghindari pendalaman ketidakpercayaan, salah perhitungan, dan pola perilaku yang didasarkan pada permainan zero-sum.

Asia Tenggara juga terletak di tengah kawasan dinamis ini dan merupakan saluran dan portal yang sangat penting untuk hal yang sama. Oleh karena itu, adalah kepentingan ASEAN untuk memimpin pembentukan arsitektur ekonomi dan keamanan mereka dan

memastikan bahwa dinamika tersebut akan terus membawa perdamaian, keamanan, stabilitas dan kemakmuran bagi masyarakat di Asia Tenggara maupun di Asia yang lebih luas. -Pasifik dan Samudera Hindia atau Indo-Pasifik. ASEAN, yang selama beberapa dekade telah terlibat dalam pengembangan arsitektur regional yang inklusif, perlu secara konsisten muncul dengan kepemimpinan kolektifnya dalam menempa dan membentuk visi untuk kerjasama yang lebih erat di Indo-Pasifik dan untuk terus mempertahankan peran sentralnya. dalam arsitektur regional yang berkembang di Asia Tenggara dan wilayah sekitarnya. ASEAN juga perlu terus menjadi perantara yang jujur dalam lingkungan strategis kepentingan yang saling bersaing.

Dengan latar belakang ini, para Pemimpin ASEAN telah sepakat untuk membahas lebih lanjut prakarsa yang memperkuat arsitektur regional yang berpusat pada ASEAN, yaitu ASEAN Outlook on the Indo-Pacific. Outlook ini tidak ditujukan untuk membuat mekanisme baru atau mengganti yang sudah ada; sebaliknya, ini adalah pandangan yang dimaksudkan untuk meningkatkan proses pembangunan Komunitas ASEAN dan untuk memperkuat dan memberikan momentum baru bagi mekanisme yang dipimpin ASEAN untuk menghadapi tantangan dan meraih peluang yang muncul dari lingkungan regional dan global saat ini dan di masa depan. Selain itu, Outlook dimaksudkan untuk menjadi inklusif dalam hal ide dan proposal. Pandangan ASEAN tentang Indo-Pasifik memandang Sentralitas ASEAN sebagai prinsip dasar untuk mempromosikan kerja sama di kawasan Indo-Pasifik, dengan mekanisme yang dipimpin ASEAN, seperti KTT Asia Timur (EAS), sebagai platform untuk dialog dan implementasi Kerjasama Indo-Pasifik, sambil mempertahankan formatnya. Selanjutnya,

ASEAN juga dapat berusaha untuk mengembangkan, jika sesuai, kerjasama dengan mekanisme regional dan sub-regional lainnya di kawasan Asia-Pasifik dan Samudra Hindia pada bidang-bidang tertentu yang menjadi kepentingan bersama untuk melengkapi prakarsa-prakarsa yang relevan.

Untuk mewujudkan elemen-elemen kunci Outlook ASEAN tentang Indo-Pasifik, ASEAN akan melakukan kerja sama di berbagai bidang, termasuk: Kerjasama Maritim. Tantangan geopolitik yang ada dan muncul yang dihadapi negara-negara di kawasan juga berkisar pada isu-isu maritim seperti sengketa maritim yang belum terselesaikan yang berpotensi konflik terbuka. Selain itu, eksploitasi sumber daya laut yang tidak berkelanjutan dan pencemaran laut juga semakin menjadi masalah utama. Ada kebutuhan untuk mencegah, mengelola, dan akhirnya menyelesaikan masalah ini dengan cara yang lebih fokus, damai, dan komprehensif. Bidang-bidang kerja sama maritim, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional yang diakui secara universal termasuk Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982, dapat mencakup peningkatan lebih lanjut dari:

1. Kerjasama untuk penyelesaian sengketa secara damai; mempromosikan keselamatan dan keamanan maritim, dan kebebasan navigasi dan penerbangan; menangani kejahatan lintas negara, termasuk perdagangan orang atau obat-obatan terlarang, pembajakan laut, perampokan dan perampokan bersenjata terhadap kapal di laut, dan lain-lain.
2. Kerjasama pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan; untuk terus mempromosikan konektivitas maritim; untuk melindungi mata pencaharian masyarakat pesisir dan

untuk mendukung masyarakat nelayan skala kecil; untuk mengembangkan ekonomi biru dan untuk mempromosikan perdagangan maritim, dan lain-lain.

3. Kerjasama untuk mengatasi pencemaran laut, kenaikan permukaan laut, sampah laut, pelestarian dan perlindungan lingkungan laut dan keanekaragaman hayati; mempromosikan pengiriman hijau, dan lain-lain.
4. Kerjasama teknis dalam kerjasama ilmu kelautan; penelitian dan Pengembangan; berbagi pengalaman dan praktik terbaik, pengembangan kapasitas, mengelola bahaya laut, sampah laut, meningkatkan kesadaran tentang masalah terkait laut dan laut, dan lain-lain.

Bidang kerjasama kedua adalah menghubungkan konektivitas. Inisiatif konektivitas saat ini dan masa depan di kawasan Indo-Pasifik harus melengkapi dan mendukung Master Plan on ASEAN Connectivity (MPAC) 2025 yang ada. Visi ASEAN tentang Konektivitas, yaitu untuk mencapai kawasan yang terhubung dan terintegrasi secara mulus dan komprehensif yang akan mendorong daya saing, inklusivitas, dan rasa kebersamaan yang lebih besar, serta Deklarasi pada KTT Asia Timur ke-6 tentang Konektivitas ASEAN harus memandu pandangan ASEAN tentang konektivitas di kawasan Indo-Pasifik. Meningkatnya integrasi dan interkoneksi antara negara-negara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik memerlukan investasi dan upaya untuk membangun infrastruktur konektivitas, termasuk hubungan fisik, kelembagaan, dan *people-to-people*. Dampak dan pertimbangan lingkungan dan ekologi harus diperhitungkan untuk memastikan

keberlanjutan inisiatif tersebut dalam jangka panjang.

ASEAN Outlook on the Indo-Pacific memberikan panduan untuk keterlibatan ASEAN di kawasan Asia-Pasifik dan Samudra Hindia sekaligus juga mengakui potensi kerjasama dengan mekanisme regional lainnya di kawasan Asia-Pasifik dan Samudra Hindia dalam isu-isu kepentingan bersama melalui pendekatan inovatif, antar-disiplin dan saling melengkapi berdasarkan mekanisme yang dipimpin ASEAN yang relevan, seperti EAS. selain itu diskusi strategis mengenai hal ini dan kegiatan kerjasama praktis dapat dilakukan pada mekanisme yang dipimpin ASEAN termasuk antara lain EAS, mekanisme ASEAN Plus One, ARF, dan ADMM-Plus.

Global Maritime Fulcrum: An Overview

Latar belakang pemerintah Indonesia dibawah pemerintahan Jokowi mengeluarkan kebijakan luar negeri "poros Maritim dunia" atau Global Maritim global (GMF) memiliki beberapa faktor motivasi. Pertama, latar belakang sejarah, diyakini bahwa leluhur dari Indonesia terutama bahwa kerajaan Sriwijaya dan Majapahit pada abad ke-14 dan 600 abad ke-16 mengembangkan armada yang kuat untuk menaklukkan tidak hanya di laut lokal di Indonesia wilayah tetapi diperluas hingga Thailand Selatan dan Filipina, ini menjadi sumber semangat identitas Maritim Indonesia.

Kedua, secara geografis, Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan wilayah yang luas yang memiliki 1.826.440 kilometer persegi daratan dan 2.800.000 kilometer persegi lautan dengan 92.877 km persegi dari perairan pedalaman dengan Pulau berjumlah 18.108. Lebih lanjut, Indonesia memperluas wilayahnya

di bawah zona ekonomi eksklusif (EEZ) sejauh 7.900.000 kilometer persegi. Faktor lain yang membuat hal ini menjadi lebih signifikan, karena nilai strategisnya dari sumber daya alam seperti kayu, minyak bumi, gas alam, timah, nikel, tembaga, batu bara dan bahkan Perikanan.

Ketiga, dalam hal posisi Geo-strategis, Indonesia terletak di lokasi yang sangat strategis dan dinamis, yang terletak di antara dua lautan, yaitu Samudra Hindia dan Samudera Pasifik. Dalam posisi ini, Indonesia dapat dilihat sebagai "jembatan" dari dua lautan di mana terletak antara Samudera Hindia di benua Asia dan Pasifik di benua Australia yang memiliki empat dari tujuh jalur laut Maritim besar yaitu Selat Sunda, Selat Makassar, Selat Lombok dan yang lebih penting lagi adalah Selat Malaka yang memainkan peranan yang sangat penting untuk perdagangan gerakan untuk beberapa negara. Dalam kenyataan ini, di wilayah Indo-Pasifik, sentralitas strategis di Indonesia terkait dengan hubungan ekonomi, politik dan militer, terutama dari kekuatan utama hingga menengah seperti Amerika Serikat, India, Australia, Cina Jepang dan Korea Selatan yang sangat mempertimbangkan stabilitas, kebijakan luar negeri dan pemikiran geopolitik.

Visi Poros Maritim Dunia terdiri dari beberapa pilar kebijakan yakni:

1. Membangun kembali budaya Maritim Indonesia. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar dengan 18.000 pulau, harus menyadari bahwa lautan sebagai bagian dari identitas nasional dan kemakmuran yang berarti oleh manajemen laut yang baik menentukan masa depan Indonesia.

2. Memelihara dan mengelola sumber dayakelautan, dengan pengembangan industri perikanan yang berkesinambungan melalui kedaulatan di sektor pangan laut.
3. Memprioritaskan konektivitas maritim dan pengembangan infrastruktur. Program termasuk mengembangkan jaringan logistik dan pelabuhan laut dalam, mendirikan industri pariwisata Maritim, membangun jalan tol di sepanjang pantai Jawa dan industri pelayaran.
4. Mengintensifkan diplomasi Maritim. Hal ini dengan mengundang negara mitra untuk bekerja sama dalam masalah Kelautan guna mengurangi dan menengahkan sengketa serta faktor konflik seperti sengketa teritorial, penangkapan ikan ilegal, penyelundupan, pembajakan, pelanggaran kedaulatan dan polusi.
5. Penguatan kemampuan pertahanan Maritim Indonesia. Tujuannya bukan hanya untuk mempertahankan kedaulatan Maritim Indonesia dan sumber daya alamnya, tetapi juga menjamin keamanan dan keselamatan kawasan keamanan laut.

Dalam lingkup Regional, kebijakan Maritim Indonesia berpusat pada perluasan keterlibatannya di wilayah Indo-Pasifik, dilakukan dengan meningkatkan peran Indonesia di Samudera Hindia dan Pasifik. Konsep Indo-Pasifik yang dikembangkan oleh Indonesia menekankan kebiasaan dialog dan kerjasama, inklusivitas, dan penghormatan terhadap hukum internasional.

Keputusan Indonesia dalam ASEAN Outlook on Indo Pacific

Awalnya, istilah Indo-Pasifik digunakan sebagai konsep biogeografis untuk wilayah laut Bumi terdiri dari perairan Samudera Hindia, Samudra Pasifik bagian barat dan tengah, dan yang menghubungkan dua samudra di Laut Cina Selatan (Miyake, 2018). Namun, sejak Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara konsisten menggunakan istilah itu selama kunjungannya di Asia pada November 2017, istilah itu berubah menjadi strategis dan memperoleh beragam interpretasi dan analisis dari komunitas politik luar negeri. Terlepas dari interpretasi tersebut, Indonesia memiliki konsepnya sendiri. Yang digambarkan Presiden Indonesia Visi Joko Widodo tentang kerja sama Indo-Pasifik. Menurutnya, Kerja sama Indo-Pasifik harus didasarkan pada Persatuan ASEAN dan Sentralitas yang berfokus pada tiga aspek:

1. Pertama, ASEAN perlu menciptakan kawasan yang menghormati hukum internasional, mempromosikan dialog dan penyelesaian sengketa secara damai, dan menghindari penggunaan kekuatan apa pun.
2. Kedua, ASEAN perlu menangani masalah keamanan transnasional, seperti perdagangan narkoba, perdagangan manusia, terorisme, dan pembajakan.
3. Ketiga, ASEAN harus mendorong “pusat pertumbuhan ekonomi baru” di India dan Pasifik Selatan Lautan melalui “sistem ekonomi yang terbuka dan adil”.

Kepentingan Indonesia dalam meginsiasi AOIP adalah: 1) kepentingan ekonomi, hal ini dilihat dari keinginan Indonesia untuk membangun tol laut sebagai salah satu cara memenuhi kepentingan nasionalnya untuk

menjadikan Indonesia sebagai PMD. 2) kepentingan pertahanan, ekonomi dan pertahanan selalu berdampingan. Untuk membantu Indonesia meminimalisir ancaman yang terjadi di perairan Indonesia. 3) kepentingan tatanan dunia, di tengah perebutan kedua kekuatan besar yang samasama menjadi negara yang bekerja sama diberbagai bidang dengan Indonesia membuat Indonesia memetakan kepentingan tatanandunia untuk tetap menjaga posisi Indonesia di kawasan.

Sejatinya, tujuan dari pembentukan AOIP oleh Indonesia itu sendiri adalah untuk melebarkan cakupan kepentingannya sehingga Indonesia dapat memiliki dukungan dan ruang yang lebih luas dalam menjalankan politik luar negerinya. Konsep Indo-Pasifik ini secara strategis menempatkan Indonesia pada jantung kawasan, oleh karena itu membenarkan visi Indonesia menjadi Poros Maritim Global. Namun, ini juga berarti bahwa Indonesia harus memainkan peran yang lebih besar untuk mempertahankan pertemuan kepentingan internal dan internasionalnya.

SIMPULAN

Kawasan Asia-Pasifik dan Samudra Hindia termasuk yang paling dinamis di dunia serta pusat pertumbuhan ekonomi selama beberapa dekade. Akibatnya, wilayah-wilayah tersebut terus mengalami pergeseran geopolitik dan geostrategis. Pergeseran ini menghadirkan peluang sekaligus tantangan. Di satu sisi, pertumbuhan ekonomi kawasan membuka kemungkinan kerjasama untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup jutaan orang. Di sisi lain, munculnya kekuatan material, yaitu ekonomi dan militer, membutuhkan menghindari pendalaman ketidakpercayaan, salah

perhitungan, dan pola perilaku yang didasarkan pada permainan zero-sum.

Asia Tenggara juga terletak di tengah kawasan dinamis ini dan merupakan saluran dan portal yang sangat penting untuk hal yang sama. Oleh karena itu, adalah kepentingan ASEAN untuk memimpin pembentukan arsitektur ekonomi dan keamanan mereka dan memastikan bahwa dinamika tersebut akan terus membawa perdamaian, keamanan, stabilitas dan kemakmuran bagi masyarakat di Asia Tenggara maupun di Asia yang lebih luas. -Pasifik dan Samudera Hindia atau Indo-Pasifik. ASEAN, yang selama beberapa dekade telah terlibat dalam pengembangan arsitektur regional yang inklusif, perlu secara konsisten muncul dengan kepemimpinan kolektifnya dalam menempa dan membentuk visi untuk kerjasama yang lebih erat di Indo-Pasifik dan untuk terus mempertahankan peran sentralnya. dalam arsitektur regional yang berkembang di Asia Tenggara dan wilayah sekitarnya. ASEAN juga perlu terus menjadi perantara yang jujur dalam lingkungan strategis kepentingan yang saling bersaing.

Disetujuinya AOIP dalam KTT ASEAN merupakan bukti dari keberhasilan Indonesia dalam membawa isu maritim di kawasan. Tetapi, tujuan dari dibentuknya AOIP itu sendiri tidak hanya untuk menetapkan ASEAN sebagai organisasi sentral di kawasan Asia Tenggara, namun juga Indonesia ingin membawa kepentingan nasionalnya masuk dalam isu kawasan tersebut. Sejatinya, tujuan dari pembentukan AOIP oleh Indonesia itu sendiri adalah untuk melebarkan cakupan kepentingannya sehingga Indonesia dapat memiliki dukungan dan ruang yang lebih luas dalam menjalankan politik luar negerinya. Konsep Indo-Pasifik ini secara strategis menempatkan Indonesia pada jantung kawasan, oleh karena itu membenarkan visi Indonesia menjadi Poros

Maritim Global. Namun, ini juga berartibahwa Indonesia harus memainkan peranyang lebih besar untuk mempertahankan pertemuan kepentingan internal dan internasionalnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agastia, I. G. B. D., & Perwita, A. A. B. (2015). *Jokowi's Maritime Axis: Change and Continuity of Indonesia's Role in Indo-Pacific*.
- Atriandi, R. (2017). *The Indian Ocean and Indonesia's Global Maritime Fulcrum: Relevance to ASEAN*.
- . (2013). *Reinvention in Indonesia's Foreign Policy Strategy*. East Asia Forum Quarterly. Vol. 5 No. 4 October-December 2013.
- Arase, David. (2015). *China's Two Silk Roads: Implications for Southeast Asia*. Singapura: ISEA Perspective.
- Aswicahyono, H & Deni Friawan. (2008). *Infrastructure Development in Indonesia*. ERIA Research Project Report 2007-2: Chiba.
- Bateman, S. (2016). *Maritime security governance in the Indian Ocean region*.
- Bergin, A. (2014). *The Indian Ocean Rim Association: a progress report | The Strategist*.
- Burchill, Scott. (2005). *The National Interest in International Relations Theory*. New York: Palgrave Macmillan.
- Cohen, S.B. (2014). *Geopolitics: The Geography of International Relations*. Rowman & Littlefield.
- Connely, A.L. (2015). *Sovereignty and the Sea: President Joko Widodo's Foreign Policy Challenges*. Contemporary Southeast Asia. 37No. 1. 2015.
- Copper, J.F. (2016). *China's Foreign Aid and Investment Diplomacy*. Volume 1 Nature, Scope, and Origin. New York City: Palgrave Macmillan.
- Cribb, Robert and Michele Ford. (2009). *Indonesia Beyond the Water Age, Managing an Archipelagic State*
- Djumala, D. (2015). *Diplomacy for maritime fulcrum*.

- Dunne, T. Kurki, M., & Smith, S. (2013). *International Relations Theories: Discipline and Diversity*.
- Dharma Negara, Siwage dan Leo Suryadinata. (2018). *Indonesia and China's Belt and Road Initiative: Perspectives, Issues, and Prospects*. ISEAS.
- Flint, C. (2011). *Introduction to Geopolitics*. Routledge. <http://www.rotledge.com/Introduction-to-Geopolitics-3rdEdition/Flint/p/book/9781138192164>.
- Hettne, Björn and Frederik Söderbaum (1998) *New Regionalism*.
- Hussein, Z. (2014). *Indonesia's Key in China's Vision of Maritime Silk Road*. <http://www.indonesiaindigest.net/3283maritime.htm>.
- Jackson, Robert dan Georg Sorensen. (2013). *Pengantar Hubungan Internasional Teori dan Pendekatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Keohane, RO and Joseph Nye. (1977). *Power and Interdependence. World Politics in Transition*. Boston: Little, Brown.
- Liow, Joseph Chinyong. (2015). *Dictionary of Modern Politics of South East Asia*.
- Madu, L. (2018). *Urgensi Indian Ocean Rim Association (IORA) dalam Diplomasi Maritim Indonesia*. Intermestic.
- Mahan, Alfred Thayer. (1890). *The Influence of Sea Power Upon History 1660-1783*. Boston: Little Brown and Company
- Mckinder, Halford. (1904). *The Geographical Pivot of History*. The Geographical Journal Vol 23 No 4 1904.
- Nugroho, A. (2015). *Membedah Gagasan A. Mahan Tentang Sea Power*.
- Organski, A F K. (1958). *World Politics*. New York.
- Pattiradjawane, R.L. (2016). *The Indonesian Perspective Toward Rising China: Balancing the National Interest*. Asian Journal of Comparative Politics.
- Pradhan, Sanjeevan. (2016). *China's Maritime Silk Route and Indonesia's Global Maritime Fulcrum: Complements and Contradictions*. Institute of Chinese Studies. Delhi.
- Ramadhan, Iqbal. (2018). *China's belt Road Initiative: Dalam Pandangan Teori Geopolitik Klasik*. Intermestic: Journal of International Studies. Volume 2, no. 2 Mei 2018. issn.2503-443X.
- Saha, P. (2016). *Indonesia's potential as a maritime power*. *Maritime Affairs: Journal of the National Maritime Foundation of India*.
- Santikajaya, Awidya. (2014). *Indonesia: A Potential Leader in the Indian Ocean*
- Schoettli, J. (Ed.). (2018). *Maritime governance and South Asia: trade, security and sustainable development in the Indian Ocean*. New Jersey: World Scientific.
- Shekhar, V. (2018). *Indonesia's foreign policy and grand strategy in the 21st century: rise of an Indo-Pacific power*. Milton Park, Abingdon, Oxon; New York, NY: Routledge.
- Stubbs, Richard and Geoffrey Underhill. (2005). *Political Economy and The Changing Global Order*.
- Sukma, R. (2009). Indonesia needs a post-ASEAN foreign policy - Tue, June 30 2009 - The Jakarta Post.
- Supriyanto, Ristian Atriandi, 2016. *Developing Indonesia's Maritime Strategy under President Jokowi*.
- Sinaga, LC. (2015). *The Dynamics of Indonesia-China Relations in Politics, Defence-Security, and Economy in Southeast Asia: an Indonesian Perspective*. Jakarta: LIPI Press.
- Sriyanto, Nanto. (2018). *Global Maritime Fulcrum Indonesia-China Growing Relations and Indonesia Middlepowermentship in East Asia Region*. Jurnal Kajian Wilayah Vol. 9 No. 1 2018.
- Till, G. (2015). *Indonesia as a Growing Maritime Power: Possible Implications for Australia*. Sea Power Center: Australia.
- Wicaksana, IGW. (2017). *Indonesia's Maritime Connectivity Development: Domestic and International Challenges*. Asian Journal of Political

Science Yagci, Mustafa. (2018). *Rethinking in Light of China's Belt and Road Initiative*. Uluslararası İlişkiler Vol. 15 No 57 2018.

Zhao Hong. (2015). *China's New Maritime Silk and Road: Implications and Opportunities for Southeast Asia, Trends in Southeast Asia*. http://www.iseas.edu.sg/image/pdf/Trends_2015_3.pdf.